



**DAMPAK YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (*GERECHTELIJKE  
PLAATSOPNEMING*) DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG  
DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Ratih Mannul Izzati, SH  
11010110401040**

**PEMBIMBING :**

**Prof.Dr.Nyoman Serikat Putra Jaya,SH,MH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012**

**DAMPAK YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (*GERECHTELIJKE  
PLAATSOPNEMING*) DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG  
DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA**

**Disusun Oleh :**

**Ratih Mannul Izzati, SH**

**11010110401040**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 29 Maret 2012**

**Tesis ini telah diterima**

**Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum,**

**Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro,**

**Prof.Dr.Nyoman Serikat Putra Jaya,SH,MH.  
NIP.19481212 197603 1003**

**Prof.Dr.Arief Hidayat, SH,MS.  
NIP.19560203 198103 1002**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Ratih Mannul Izzati, S.H., menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 29 Maret 2012

Penulis

Ratih Mannul Izzati, S.H.  
NIM. 11010110401040

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah S.W.T. karena atas berkat rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **“DAMPAK YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (*GERECHTELIJKE PLAATSOPNEMING*) DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA”** yang merupakan salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh derajat kesarjanaan Magister pada Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum dan Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan dengan arif, bijak dan penuh kesabaran berkenan memberikan pencerahan, masukan, arahan dan membagikan ilmu Beliau khususnya mengenai ilmu pengetahuan serta wawasan dalam bidang Hukum Acara Pidana kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH,MH, sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH,MH. (Alm), sebagai Dosen Penguji Proposal yang telah berkenan pula memberikan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak Sukinta, SH,M.Hum, sebagai Dosen Penguji Proposal yang telah berkenan pula memberikan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak Dr. Pujiono, SH, M.Hum, sebagai Moderator dan Dosen Penguji Tesis yang telah berkenan pula memberikan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.

6. Bapak Dr. Eko Soponyono, SH, MH. sebagai Dosen Penguji Tesis yang telah berkenan pula memberikan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
8. Teman-teman kuliah pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
9. Bapak Hari Mulyanto R, SH. Dan Bapak Zainuri, SH. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran (2009-2011) dan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran (2011-sekarang) yang telah memberikan izin untuk menjalani tugas belajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
10. Para Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran.
11. Seluruh Staf Pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran serta rekan-rekan Calon Hakim yang turut memberikan motivasi kepada penulis.
12. Keluarga tercinta, Ayah, Mama dan Adik yang dengan tulus memberikan doa dan semangat demi selesainya perkuliahan dan tesis ini.
13. Alfian Wahyu Pratama, SH, MH. yang selalu memberikan motivasi dan doa buat penulis.
14. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tesis ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan dan penguasaan ilmu di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan ilmu di bidang Peradilan pada khususnya. Penulis senantiasa membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini ada manfaatnya.

Semarang, 29 Maret 2012

Penulis

## MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu, karena ***sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan***, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan ***hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap***.  
(QS. ALAM NASYRAH).

### HALAMAN PERSEMBAHAN:

Tesis ini penulis persembahkan, untuk:

Ayah , Mama dan Adik yang tercinta dan tersayang

Alfian dan Sahabat-sahabatku

Instansiku (Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan Almamaterku  
(UNDIP)

## ABSTRAK

Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, dimaksudkan untuk mencari solusi hukum dari dampak kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang timbul mengenai penerapan pemeriksaan setempat. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur secara normatif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai aplikasi pemeriksaan setempat.

Permasalahan yang ditampilkan dalam tesis ini, diantaranya: Bagaimana kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana pada saat ini, Apa fungsi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana, Bagaimana dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana, serta Bagaimana formulasi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang.

Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter dengan menggunakan metode sistimatis yang dianalisis secara kualitatif normatif.

Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa yang menjadi kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini merupakan kebijakan yang berasal dari penemuan hukum oleh hakim dengan metode konstruksi hukum, yang mengedepankan keadilan substansial dan asas peradilan cepat. Selanjutnya, fungsi pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana digunakan untuk keyakinan hakim, pertimbangan untuk menetapkan penyerahan barang bukti serta menambah keterangan bagi hakim. Kemudian dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana adalah, tidak adanya unifikasi (keseragaman) aturan mengenai pemeriksaan setempat dalam praktik hukum acara pidana pada saat ini, yang meliputi: ketidakseragaman mengenai para pihak yang mengikuti pemeriksaan setempat dalam perkara pidana dan ketidakseragaman mengenai uraian pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara pidana yang tidak jelas dan lengkap. Oleh karena masih terjadi ketidakseragaman terkait pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini, maka perlu formulasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara jelas tentang aturan ruang lingkup serta tata cara pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana untuk menciptakan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pemeriksaan Setempat, Hukum Acara Pidana, Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.

## ABSTRACT

Discussion of the theoretical and normative assessment of The Judicial Impact of the Local Examination (*gerechtelijk plaatsopneming*) on The Criminal Procedural Law in Light of Criminal Verdict Legal Considerations Aspects, intended to seek legal solutions of the impact of the legal vacuum (*recht vacuum*) a rising on the application of the local examination. This is because there are no regulations governing the normative in the Book of Law Criminal Code (KUHP) regarding the application of the local examination.

Issues presented in this thesis, such as: How the policy of local examination (*gerechtelijke plaatsopneming*) applications in criminal procedure at this point, What is the function of local examination (*gerechtelijke plaatsopneming*) in consideration of criminal case law decisions, how the judicial impact of the local examination (*gerechtelijke plaatsopneming*) in the criminal procedure law, as well as How to check the local examination (*gerechtelijke plaatsopneming*) formulation in the renewal of the Criminal Procedure Code to come.

This study uses the method of approach to the specification of normative legal analytical descriptive study, using the data type of research focused on secondary data collected through the study of literature and documentary studies using systematic methods were analyzed qualitatively normative.

Based on the results of the study can be seen that the policy of the local examination applications in criminal procedure at the time this was a policy stemming from the discovery of the law by judges with the legal construction method, which emphasizes the principles of fairness and substantial justice quickly. Furthermore, the function of the local examinations in criminal cases to judge faith, consideration to establish proof of delivery and add the testimony for judges. Later, the judicial impact of the local examination (*gerechtelijke plaatsopneming*) in criminal law is, the absence of unification (uniformity) local rules regarding examinations in the practice of criminal law at the moment, which include: unequal on the parties to follow the local inspection and inequality in the criminal case concerning description of the local examination within the legal considerations in the decision of criminal cases that are not clear and complete. Therefore, there is still unequal relevant local examination in criminal procedure at this point, it is necessary to the formulation of the renewal of the Book of the Law of Criminal Law (KUHP) is clear about the scope of the rules and procedures for local examination in the criminal procedure law to create legal certainty .

Keywords: Local Examination, Criminal Procedure Law, Criminal Verdict Legal Considerations.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika Penyajian .....	42
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	44
A. Tinjauan Umum Mengenai Pemeriksaan Setempat.....	44
B. Tinjauan Umum Mengenai Proses Persidangan Dengan Acara Pemeriksaan Biasa Menurut KUHAP .....	51
C. Tinjauan Umum Mengenai Sistim Pembuktian Dalam Perkara Pidana .....	61
D. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Dalam Perkara Pidana.....	67

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	74
A. Kebijakan Aplikasi Pemeriksaan Setempat Dalam Hukum Acara Pidana Pada Saat Ini .....	74
A.1. Kasus dan Analisis Terhadap Pemeriksaan Setempat dalam Proses Persidangan Perkara Pidana di Indonesia .....	75
A.2. Kebijakan Aplikasi Pemeriksaan Setempat dalam Proses Persidangan Perkara Pidana .....	109
B. Fungsi Pemeriksaan Setempat Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana .....	115
C. Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat Dalam Hukum Acara Pidana .....	119
C.1 Ketidakseragaman Para Pihak Yang Mengikuti Pemeriksaan Setempat Dalam Perkara Pidana .....	120
C.2 Ketidakseragaman Uraian Fakta dan Pertimbangan Hukum Mengenai Pemeriksaan Setempat Dalam Putusan Perkara Pidana .....	123
D. Formulasi Pemeriksaan Setempat dalam Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana .....	128
BAB IV: PENUTUP .....	133
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	136
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 ( Kerangka Teoritik penelitian “Dampak Yuridis Pemeriksaan setempat ( <i>gerechtelijke plaatsopneming</i> ) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana” ).....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar hukum negara Indonesia yang merupakan induk dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia. Aturan hukum yang diatur berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah : peraturan hukum pidana.

Pokok peraturan hukum pidana di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil<sup>1</sup> adalah peraturan-peraturan yang mengatur apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum, atau peraturan-peraturan yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana, syarat-syarat pembedaan dan ketentuan mengenai pidananya.

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia tidak dapat dilaksanakan apabila hanya berdasarkan hukum pidana materiil

---

<sup>1</sup> A.Siti Soetami, ***Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi Revisi 2001***, Penerbit:Rafika Editama, Bandung , 2001, hlm : 69

semata. Penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan, apabila terdapat peraturan-peraturan mengenai cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil yang disebut dengan hukum pidana formil. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai hukum pidana formil ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini merupakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang di sahkan pada tanggal 31 Desember 1981. KUHP ini menggantikan Pasal 1 sampai dengan Pasal 117 HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement* ) yang merupakan peraturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia sebelum KUHP diberlakukan.

Pemberlakuan KUHP di Indonesia diharapkan membawa perubahan positif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kelemahan maupun kekurangan yang terdapat pada aturan-aturan di dalam KUHP. Kekurangan dan kelemahan dalam KUHP tersebut, antara lain : terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan praktik penegakan hukum, dan terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang dapat berpengaruh pada upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.

Salah satu contoh pasal di dalam KUHP yang bertentangan dengan praktik penegakan hukum terdapat pada Pasal 244 KUHP mengenai putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Penerobosan

terhadap larangan Pasal 244 tersebut pada praktik penegakan hukum dimulai dari keluarnya keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 pada tanggal 10 Desember 1983. Selanjutnya, penerobosan Pasal 244 juga dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung sendiri secara *contra legem* (terang-terangan bertentangan dengan undang-undang) dengan mengeluarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Yurisprudensi Putusan Reg.No.275K/Pid/1983 yang pada intinya berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi.<sup>2</sup>

Kekurangan dan kelemahan dalam KUHAP tidak hanya terdapat pada pasal yang bertentangan dalam penegakan hukum. Akan tetapi juga adanya kekosongan hukum dalam KUHAP. Salah satu contoh kekosongan hukum dalam KUHAP adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti elektronik.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah hanya terdiri dari : surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan di dalam ketentuan KUHAP tidak ada pasal yang mengatur mengenai bukti-bukti transaksi elektronik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam hukum acara pidana.

Kekosongan hukum tersebut, akhirnya ditutup dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 15

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm : 543-544.

Tahun 2003 tentang Terorisme, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Perundang-undangan tersebut mengatur mengenai bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana perkara-perkara tertentu, selain alat bukti yang diatur pada Pasal 184 KUHP. Perkara-perkara yang dapat diajukan alat bukti elektronik, antara lain : *cyber crime*, tindak pidana korupsi, terorisme dan pencucian uang.

Berdasarkan kekurangan dan kelemahan KUHP tersebut, timbul konsekuensi logis untuk diadakannya pembaharuan dalam KUHP. Pembaharuan dalam KUHP merupakan salah satu tahap dari penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu (1) tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang menjadi wewenang lembaga legislatif, (2) tahapan penerapan /aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif dan (3) tahapan pelaksanaan/administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif.<sup>3</sup>

Pembaharuan dalam KUHP masih diperlukan dalam praktik penegakan hukum, misalnya : dalam tahapan penerapan /aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif (Pengadilan) merupakan salah satu sub sistim peradilan pidana.

---

<sup>3</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, **Bahan Kuliah Sistim Peradilan Pidana (Criminal Justice System)**, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2010, hlm : 11

Melalui lembaga pengadilan ini, diharapkan tercipta penegakan hukum pidana yang konsekuen di Indonesia.

Produk dari Pengadilan yang dirasakan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat ialah putusan hakim. Putusan Hakim tersebut, tercipta dari proses-proses persidangan yang sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP).

Namun, pada praktiknya beberapa ketentuan KUHP masih berlaku umum dan bersifat abstrak. Sehingga ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung di persidangan. Oleh karena itu, maka hakim sebagai pemegang peran penting dalam proses persidangan perlu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada intinya penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi *das sollen* dengan *das sein*. Hal tersebut dinyatakan, sebagai berikut :

Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang kongkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkret (*das sein*) tertentu.<sup>4</sup>

Contoh konkrit proses persidangan yang memerlukan penemuan

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Penerbit : Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm : 37



hukum oleh hakim dalam ranah hukum acara pidana, terjadi pada persidangan perkara pidana di beberapa pengadilan Negeri di Indonesia. Perkara-perkara tersebut, antara lain :

1. Perkara pidana nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung jo nomor : 37/Pid/2010/PT.Smg jo nomor : 1074K/PID/2010 mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 284 KUHP yaitu zina).
2. Perkara pidana nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Ung mengenai tindak pidana perlindungan konsumen (Pasal 8 Ayat (1) huruf b, c jo Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu secara bersama-sama memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan, sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya) .
3. Perkara pidana nomor : 95/Pid.Sus/2010/PN.Ska mengenai tindak pidana menghuni rumah tanpa persetujuan dan izin dari pemiliknya (Pasal 12 Ayat (1) jo Pasal 36 Ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman)

Pembuktian unsur tindak pidana pada perkara tersebut, harus melewati proses persidangan dengan acara pemeriksaan biasa di Pengadilan. Proses ini diperlukan oleh hakim, untuk memutuskan

apakah Terdakwa dalam perkara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Proses pembuktian dalam perkara tersebut harus sesuai dengan sistim pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yaitu sistim pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Sistim pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pada intinya, Pasal 183 KUHAP tersebut menyebutkan bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Maksud dari keyakinan hakim pada Pasal 183 KUHAP tersebut adalah keyakinan yang diperoleh hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Sedangkan pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam persidangan dapat dipenuhi dari 5 (lima) alat bukti yang telah diatur pada Pasal 184 KUHAP, antara lain :

1. Keterangan saksi .  
Keterangan saksi yang dimaksud adalah keterangan yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan.
2. Keterangan ahli.  
Keterangan ahli yang dimaksud adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
3. Surat .  
Surat yang dimaksud adalah surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
4. Petunjuk .  
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa.

Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Pada proses pembuktian perkara-perkara pidana tersebut, hakim melakukan pemeriksaan terhadap 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Selain itu, hakim pada perkara tersebut juga melakukan pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan setempat dalam perkara pidana nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung jo nomor : 37/Pid/2010/PT.Smg jo nomor : 1074K/PID/2010 digunakan untuk mendapatkan keyakinan hakim dalam pertimbangan putusan. Sedangkan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Ung digunakan untuk memeriksa barang bukti. Sedangkan, pemeriksaan setempat dalam perkara pidana nomor : 95/Pid.Sus/2010/PN.Ska digunakan sebagai keterangan bagi hakim, yang dapat menambah keyakinan baginya dalam pertimbangan hukum putusan perkara tersebut.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam proses persidangan perkara-perkara tersebut, merupakan peran hakim untuk bersikap aktif . Hakim dalam perkara tersebut, bersikap aktif dalam mencari kebenaran materiil dengan melakukan penemuan hukum. Hal ini dikarenakan di dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak ada ketentuan yang mengatur secara normatif mengenai pemeriksaan

setempat beserta ruang lingkup dan tata caranya. Padahal, pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) diperlukan dalam proses persidangan pidana (*das sein*) untuk mendukung pembuktian perkara pidana di persidangan.

Selama ini, pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) hanya diatur secara normatif dalam ranah hukum acara perdata saja. Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 153 HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*). Pasal 153 Ayat (1) HIR menyebutkan bahwa “*Jika dipandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang Komisaris dari Majelis dengan dibantu oleh Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim*”. Pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata dilakukan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, batas, kuantitas dan kualitas objek barang terperkara.

Berdasarkan pemaparan di atas ketimpangan yang terjadi antara *das sein* dan *das sollen* dalam proses persidangan perkara pidana dengan ketentuan dalam KUHAP, membuat hakim bersikap aktif dengan melakukan terobosan hukum acara pidana. Hal ini bertujuan untuk memberlakukan pemeriksaan setempat sebagai bagian dari proses persidangan pidana. Dengan demikian demi terciptanya

kepastian hukum, maka diperlukan pembaharuan hukum acara pidana untuk mengatur mengenai ruang lingkup serta tata cara pemeriksaan setempat dalam proses persidangan pidana.

Namun, pemberlakuan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana, ternyata menimbulkan beberapa permasalahan mengenai dampak yuridis pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain : permasalahan berkaitan dengan kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana pada saat ini, fungsi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana, dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana serta formulasi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang.

Sehingga untuk mencari solusi hukum dari beberapa permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana “.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana pada saat ini ?
2. Apa fungsi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana?
3. Bagaimana dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana?
4. Bagaimana formulasi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana pada saat ini.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pemeriksaan setempat dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum acara pidana.
  - b. Menambah wawasan untuk penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberi masukan kepada pemerintah, Instansi terkait, aparat penegak hukum, pengacara serta masyarakat pada umumnya tentang dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana dipandang dari aspek pertimbangan hukum putusan perkara pidana.

- b. Menambah bahan masukan dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang hukum acara pidana.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran merupakan syarat yang sangat penting dalam suatu penelitian hukum. Kerangka pemikiran terdiri dari kerangka konseptual dan kerangka teoritik.<sup>5</sup>

### 1. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, yang termasuk kerangka konseptual dalam judul penelitian “Dampak Yuridis Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, antara lain : pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*), hukum acara pidana serta pertimbangan hukum putusan perkara pidana.

---

<sup>5</sup> Paulus Hadisuprpto, ***Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang : Metodologi Penelitian Hukum***, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

<sup>6</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, ***Peraturan Akademik dan Pedoman Penyusunan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro***, Semarang, 2008, hlm : 4



a. Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).

Dasar hukum pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara perdata terdapat pada Pasal 153 HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*), Pasal 180 RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*) serta Pasal 211 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Pengertian pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) adalah pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek barang perkara terletak guna melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang perkara, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas serta kualitas barang sengketa. Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dilakukan oleh salah satu hakim atau majelis hakim dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berperkara.<sup>7</sup>

b. Hukum Acara Pidana.

Hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana. Hukum acara pidana menentukan aturan agar para penyelidik, penyidik dan pada akhirnya hakim dapat menemukan kebenaran perbuatan yang disangka dilakukan oleh seseorang.<sup>8</sup>

Ketentuan hukum acara pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bersama dengan lahirnya KUHAP tersebut, maka ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara pidana yang termuat di dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 118 HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*), Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 serta ketentuan yang diatur dalam

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, ***Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*** Cetakan Kesepuluh, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm : 779-781

<sup>8</sup> Rd. Achmad S. Soema Di Pradja, ***Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia***, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, hlm : 5

perundangan-undangan lain sebelum lahir KUHP dinyatakan dicabut.<sup>9</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana dalam KUHP memuat ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :<sup>10</sup>

- 1) Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana.
- 2) Tata cara dari suatu proses pidana, yang meliputi :
  - a) Tindakan yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana.
  - b) Tata cara menghadapkan orang yang di dakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan ;
  - c) Tata cara melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang di dakwa melakukan tindak pidana.
  - d) Tata cara untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tersebut dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, sehingga menghindari kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana.

#### c. Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.

Putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan merupakan hasil musyawarah hakim berdasar penilaian hakim atau majelis hakim dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>9</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P Sistim Dan Prosedur*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1982, hlm : 18-19

<sup>10</sup> *Ibid*

Formalitas putusan, terdiri dari : kepala putusan, pertimbangan atau konsideran dan amar putusan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun, yang menjadi inti putusan, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya.<sup>11</sup>

Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.<sup>12</sup>

Pertimbangan hukum putusan perkara pidana harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

- 1) Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.  
Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang kemudian diuraikan dalam pertimbangan hukum berupa penguraian mengenai waktu kejadian (*tempus delictie*), tempat kejadian (*locus delictie*) serta uraian mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga didakwa oleh Penuntut umum melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan.
- 2) Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.  
Pembuktian dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana dilakukan dengan cara penguraian unsur-unsur pidana yang dikaitkan dengan fakta di persidangan, barang-barang bukti, alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP serta keyakinan hakim.  
Cara pembuktian kesalahan terdakwa tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 183 KUHP mengatur

---

<sup>11</sup> Abdullah, **Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan**, Penerbit : Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, hlm : 50-51

<sup>12</sup> **Ibid**

<sup>13</sup> Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP ..... Op Cit**, hlm: 361

mengenai sistim pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk Ste/sel*) yaitu hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

## 2. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir ketersalinghubungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variabel penelitian.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, yang termasuk kerangka teoritik dalam judul penelitian ini, antara lain : asas-asas hukum acara pidana, asas-asas pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana, teori-teori penemuan hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara serta teori-teori penjatuhan putusan.

### a. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.

Asas-asas hukum acara pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, *Loc Cit.*

1) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan :

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf c. Asas peradilan cepat dan sederhana dimaksudkan agar prosedur penanganan perkara tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1992, tgl 21 oktober 1992), yang pada pokoknya menentukan bahwa baik perkara pidana penanganannya di Pengadilan Negeri dibatasi selama 3 bulan. sedangkan penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dibatasi selama 6 bulan. Apabila jangka waktu tersebut terlewati, maka harus melaporkannya kepada Pengadilan Tinggi setempat disertai dengan alasan-alasannya.

Pembebanan biaya bagi terdakwa yang dipidana telah di tentukan pedoman biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 pada tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Biaya perkara pidana minimal Rp. 500 dan maksimal Rp.10,000,-

dengan ketentuan bagi Pengadilan Negeri Rp.7,500,- dan Pengadilan Tinggi Rp. 2,500,-.

2) *Asas Principle of Legality.*

Asas legalitas menghendaki bahwa suatu peraturan dapat diterapkan apabila ada peraturan yang mengatur sebelumnya. Contoh asas legalitas dalam hukum acara pidana terdapat pada penjelasan umum angka 3 huruf b KUHP.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan umum angka 3 huruf b KUHP bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara yang diatur dengan Undang-undang. Ketentuan tersebut diatur untuk kepastian hukum dalam penerapan hukum acara pidana.

3) *Asas Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa*

Ketentuan mengenai asas pemeriksaan perkara pidana dengan kehadiran terdakwa di atur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 terhadap perkara-perkara yang diajukan secara biasa dan singkat.

---

<sup>15</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, ***Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek***, Penerbit :Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm : 2

Pengecualian asas pemeriksaan perkara pidana dengan kehadiran terdakwa adalah pemeriksaan perkara secara *in absentia*.

Pemeriksaan perkara secara *in absentia* hanya diatur dalam pemeriksaan perkara dengan secara cepat khususnya perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) serta dalam hukum acara pidana khusus<sup>16</sup> seperti Undang-undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, Pasal 38 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 79 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4) Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*).

Setiap orang yang disangka, di tangkap, di tahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm : 9

memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf c.

Implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan dapat diketahui selama belum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap, maka terdakwa belum dapat dikatakan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

5) Asas Hak Ingkar.

Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan atas hakim yang memeriksa perkaranya, dengan alasan adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau adanya hubungan suami – istri meskipun sudah bercerai dengan ketua, jaksa, advokat, panitera dengan terdakwa atau penasihat hukumnya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Apabila terjadi pelanggaran mengenai asas ini,, mengakibatkan putusan tidak sah dan hakim atau panitera yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi



administratif. Sedangkan Pasal 168 KUHP juga menentukan bahwa seorang saksi tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila ada hubungan keluarga, sedarah, kebawah atau semenda sampai derajat ketiga, dari terdakwa, saudara terdakwa, saudara ibu atau bapak dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga serta suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama terdakwa.

6) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, penjelasan umum angka 3 huruf i KUHP, dan Pasal 153 (3) KUHP menentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Selain itu, tujuan diberlakukannya asas pemeriksaan pengadilan secara terbuka untuk menjamin obyektivitas pemeriksaan perkara.

7) Asas Perlakuan yang Sama Bagi Setiap Orang di Depan Hukum (*Equality before The Law*).

Maksud dari asas perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*Equality before The Law*) adalah setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Pengadilan mengadili menurut hukum, dengan tidak membedakan orang. Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf (a) KUHAP.

8) Asas Bantuan Hukum

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, hal mana di tentukan dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 56, 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP, dan penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP.

9) Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum, wajib memperoleh rehabilitasi dan ganti rugi. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun

2004, Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHP.

- 10) Asas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuasaan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Namun pengawasan dan pengamatannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan mendelegasikan kepada Kimwasmat (Hakim Pengawas Pengamat). Hal ini diatur dalam Pasal 227 ayat 1 KUHP, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985, serta Pasal 54 sampai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Berdasarkan pemaparan asas-asas hukum acara pidana di atas, maka aparat penegak hukum dalam menegakan hukum harus memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hukum pidana dan yang berlaku secara internasional.<sup>17</sup> Hal ini berarti, penegak hukum juga harus memperhatikan asas-asas hukum acara pidana.

---

<sup>17</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Sistim Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit :Widya Padjajaran, Bandung, 2011, hlm : 60.

b. Asas-Asas Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Pidana.

Menurut Gustav Radbruch, hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya Gustav Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, antara lain : keadilan merupakan prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.<sup>18</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara secara kasuistik selalu di hadapkan pada ketiga asas, antara lain :<sup>19</sup>

- 1) Asas Kepastian Hukum.
- 2) Asas Keadilan.
- 3) Asas Kemanfaatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Akan tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistik dan sesuai dengan kasus yang dihadapi.<sup>20</sup>

Berdasarkan praktik peradilan, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutus suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut untuk memutus suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistik). Apabila diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada di antara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri

---

<sup>18</sup>Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Penerbit : Chandra Pratama, Jakarta, 1993, hlm : 50

<sup>19</sup>Ahmad Rifai, **Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm :132

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Bab-bab Tentang Penemuan Hukum**, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm : 2

pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada di antara kedua titik tersebut.<sup>21</sup>

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Sehingga batas-batas kebebasan hakim hanya dapat bergerak di antara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas.<sup>22</sup>

#### c. Teori Penemuan Hukum.

Peraturan Perundang-undangan merupakan hukum buatan manusia yang terkadang bersifat tidak jelas, tidak lengkap, bersifat statis dan tidak dapat mengetahui perkembangan masyarakat sehingga hal ini menimbulkan ruang kosong dan harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.<sup>23</sup>

Istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada,<sup>24</sup> sehingga selanjutnya hakim mencari

---

<sup>21</sup> Ahmad Rifai, *Op Cit*, hlm :127-129

<sup>22</sup> Lintong O. Siahaan, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 252 November 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hlm : 65-66

<sup>23</sup> Jazim Hamidi, *Hermeunetika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Penerbit : UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm : 52.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab...Op Cit*, hal : 4.

dan menerapkan dalam peristiwa konkret. Pembentukan hukum berkonotasi hukumnya belum ada, sehingga hakim berkewajiban untuk membentuk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Adapun penciptaan hukum berkonotasi hukumnya sudah ada, tetapi tidak jelas atau kurang lengkap, sehingga hakim harus menciptakan hukum yang baru sebagai penyempurnaan dan atau pengganti hukum yang sudah ada.<sup>25</sup>

Argumentasi hukum dari penemuan hukum, pembentukan hukum dan penciptaan hukum adalah asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal ini hakim harus menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (vide Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009)<sup>26</sup>

Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.<sup>27</sup>

#### 1) Metode Interpretasi (Penafsiran).

Pengertian interpretasi (penafsiran) adalah suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atau suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya. Tujuan interpretasi adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.<sup>28</sup>

#### 2) Metode Konstruksi Hukum.

Metode konstruksi hukum digunakan oleh hakim pada saat dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).

---

<sup>25</sup> Jazim Hamidi, *Op Cit*, hlm : 52

<sup>26</sup> *Loc Cit*.

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Op Cit*, hlm : 167

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *Op Cit*, hlm : 61-62

Hal ini berdasarkan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan alasan hukumnya tidak ada atau belum ada hukum yang mengatur (*asas ius curia novit*). Sehingga hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat karena sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>29</sup>

d. Teori Penjatuhan Putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*). Prinsip sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.<sup>30</sup>

Hukum Acara Pidana menganut asas pembuktian negatif, hal ini berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*".<sup>31</sup>

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan

---

<sup>29</sup> Jazim Hamidi, *Op Cit*, hlm : 58

<sup>30</sup> Ahmad Rifai, *Op Cit*, hlm : 102-103

<sup>31</sup> *Ibid*

penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

1) Teori Keseimbangan.

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, seperti : keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban (dalam perkara pidana), serta kepentingan pihak Penggugat maupun Tergugat (dalam perkara perdata).<sup>33</sup>

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak Terdakwa atau Penuntut Umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.<sup>34</sup>

3) Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim.

---

<sup>32</sup> Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hlm : 7-12

<sup>33</sup> Ahmad Rifai, *Op Cit*, hal : 105

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm : 106



Pendekatan keilmuan ini merupakan peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata berdasarkan intuisi tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>35</sup>

#### 4) Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu guna menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Pengalaman seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>36</sup>

#### 5) Teori *Ratio Decidendi*.

Teori *ratio decidendi* merupakan teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>37</sup>

#### 6) Teori Kebijaksanaan.

Teori kebijaksanaan menekankan pada rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk serta dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm : 107

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm : 108

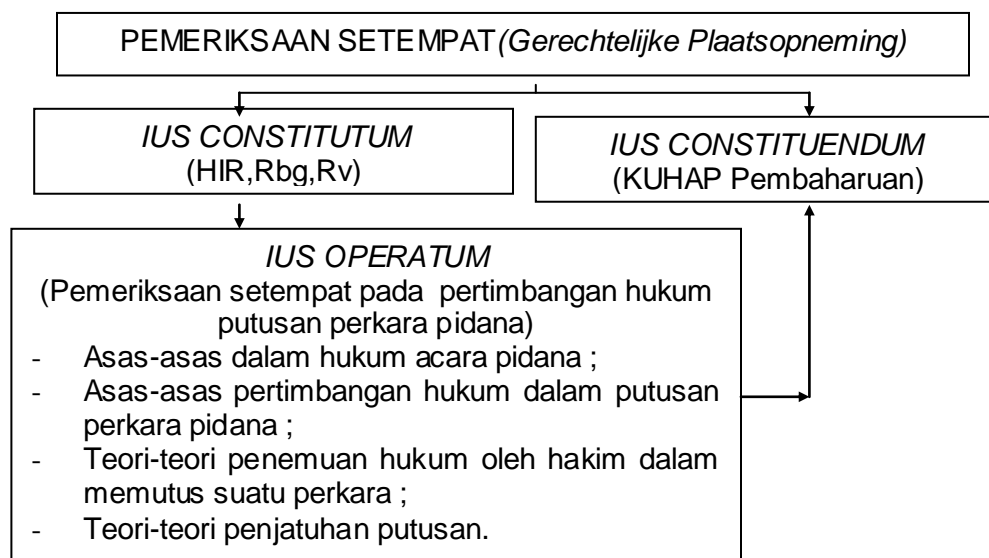
<sup>37</sup> *Ibid*, hlm : 110

<sup>38</sup> Made Sadhi Astuti, ***Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana***, Penerbit : IKIP Malang, Malang, 1997, hlm : 87

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a) Upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan.
- b) Upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana.
- c) Memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak.
- d) Pencegahan umum dan khusus.

Berdasarkan pemaparan di atas kerangka teoritik pada penelitian hukum “Dampak Yuridis Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana” dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :



**Bagan 1.1.** Kerangka Teoritik penelitian “Dampak Yuridis Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm : 87

## F. METODE PENELITIAN

Bambang Sunggono dalam bukunya yang berjudul: Metodologi Penelitian Hukum, menguraikan bahwa, “Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*methodos*”, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Selanjutnya mengenai pengertian “penelitian”, penulis mengutip batasan yang dikemukakan oleh Amirudin dan H. Zainal Asikin, yakni:

Penelitian (*research*), berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud, adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu masih perlu diuji kembali.<sup>41</sup>

Dalam hubungannya dengan usulan penelitian tesis ini dalam relevansinya dengan metode penelitian maka akan mencakup hal-hal seperti berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Rencana penelitian tesis ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif, yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta, 2006. hlm: 45

<sup>41</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm: 19

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm: 13-14.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistimatik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Terkait dengan klasifikasi tersebut di atas, penelitian tesis ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang menyangkut penelitian dengan perbandingan hukum. Perbandingan hukum dilakukan dengan cara menetapkan satu atau beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk diteliti.<sup>44</sup>

Metode perbandingan hukum diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistim hukum sebagai titik tolak perbandingan.<sup>45</sup>

Dalam Kamus Istilah Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998 diuraikan bahwa, "Sistim, adalah suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan saling membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan."<sup>46</sup>

Berdasarkan Ensiklopedia Nasional Indonesia, "Sistim adalah suatu susunan yang terdiri atas pilahan berdasarkan fungsinya, individu-individu pendukung yang membentuk kesatuan utuh, tiap

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm: 14.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm: 81.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm: 88.

<sup>46</sup> Tim Redaksi Tata Nusa, ***Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998***, Penerbit: PT. Tatanusa, Jakarta, 1999, hlm: 563.

individu di dalam sistim saling bergantung dan saling menentukan.”<sup>47</sup>

Menurut H. S. Prajudi, A, “Sistim” adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.”<sup>48</sup>

Sri Sumanti berpendapat, bahwa sistim, adalah, “Sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.”<sup>49</sup> Sedangkan Ludwig van Bertalanfly memberikan arti sistim, yakni, “*System are complexes of elements in interaction, to which certain law can be applied.*” (Sistim adalah himpunan unsur yang saling mempengaruhi untuk mana hukum tertentu menjadi berlaku).<sup>50</sup>

Menurut Pamudji, “Sistim sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh”.<sup>51</sup>

Tatang M. Amirin menyatakan bahwa sistim adalah “Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, berarti

---

<sup>47</sup>Moeslim Abdurrahman.et Al, *Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 15*, Penerbit: P.T. Citra Adi Pustaka, Jakarta, 1996, hlm: 93.

<sup>48</sup>H.S. Prajudi, A, ***Dasar-Dasar Office Manajemen***, Penerbit: Ghalia, Jakarta, 1973, hlm: 995

<sup>49</sup>Sri Sumanti, ***Sistim-Sistim Pemerintahan Negara-Negara***, Penerbit: Tarsito, Bandung, 1976, hlm: 17

<sup>50</sup>Bachsan Mustafa, ***Sistim Hukum Indonesia Terpadu***, Cetakan 1, Penerbit: P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm: 4.

<sup>51</sup>Pamudji, ***Teori Sistim dan Pengertiannya Dalam Manajemen***, Penerbit: Ikhtiar Baru, Jakarta, 1981, hlm: 4-7

pula hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur.”<sup>52</sup>

Pengertian sistim menurut Musanef, yaitu, “Sistim adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur.”<sup>53</sup>

Selanjutnya apabila kata “sistim” tersebut dihubungkan dengan “hukum” maka akan terangkai menjadi “sistim hukum”, seperti yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani, seperti berikut: Bahwa peraturan-peraturan hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain, sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat, malahan keseluruhan peraturan hukum dalam sistim masyarakat merupakan suatu sistim hukum.<sup>54</sup>

Subekti, mengartikan sistim hukum, “Sebagai suatu susunan atau aturan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penelitian untuk mencapai suatu tujuan.”<sup>55</sup>

Bellefroid menyebut sistim hukum, “ Sebagai suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.”<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup>Tatang M. Amirin, **Pokok-Pokok Teori Sistim**, Cetakan ke-7, Penerbit: PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001, hlm: 115.

<sup>53</sup>Musanef, **Sistim Pemerintahan di Indonesia**, Penerbit: CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989, hlm: 7.

<sup>54</sup>Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Cetakan Kedua, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm: 169.

<sup>55</sup>Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cetakan XI, Penerbit: Intermasa, Jakarta, 2005, hlm: 17.

<sup>56</sup>Sunaryo Wignyodipuro, **Ilmu Hukum**, Cetakan ke II, Penerbit: Alumni, Bandung, 1979, hlm: 103.

Menurut Scholten yang dikutip oleh Utrecht dengan mengatakan bahwa, "Sistim hukum merupakan kesatuan, di dalam sistim hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistim itu."<sup>57</sup>

Menurut, Soerjono Soekanto, sistim hukum mencakup tiga unsur pokok, yakni :

- a. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum.
- b. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur.
- c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.<sup>58</sup>

Sehingga berdasarkan pemaparan teori di atas, tesis ini diteliti dengan cara menetapkan beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk diteliti, yaitu dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana dipandang dari aspek pertimbangan hukum putusan perkara pidana. Selanjutnya meneliti mengenai struktur hukum, yaitu latar belakang lembaga pengadilan melakukan pemeriksaan setempat sebagai pertimbangan hukum putusan perkara pidana. Kemudian penelitian terhadap struktur hukum tersebut, dibandingkan dengan substansi hukum mengenai penerapan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana. Selain itu, tesis ini juga meneliti mengenai nilai-nilai yang dianut dalam

---

<sup>57</sup> Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Cetakan ke-4, Penerbit: Ikhtiar, Jakarta, 1957, hlm: 207.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Loc Cit.**

kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat pada hukum acara pidana.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari spesifikasinya, rencana penelitian tesis ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”<sup>59</sup>

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian dalam bidang ilmu hukum maka spesifikasi penelitian deskriptif analitisnya, adalah: “Berusaha menggambarkan masalah hukum, sistim hukum dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang bersangkutan.”<sup>60</sup>

Penelitian tesis ini tergolong spesifikasi penelitian deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana dipandang dari aspek pertimbangan hukum putusan perkara pidana.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan Hukum Acara Pidana

---

<sup>59</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm: 58.

<sup>60</sup> Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, *Op Cit*, hal:5.



Indonesia mengenai eksistensinya terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia sehingga penelitian ini termasuk spesifikasi penelitian analitis.

### 3. Jenis Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>61</sup>

- Data sekunder terdiri dari:<sup>62</sup>
- a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
    - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
    - 2) Peraturan Dasar, yaitu: Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    - 3) Peraturan perundang-undangan.
    - 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat.
    - 5) Yurisprudensi.
    - 6) Traktat.
    - 7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

---

<sup>61</sup><http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>, di unduh tanggal 3 Oktober 2011

<sup>62</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm: 13.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dokumen-dokumen dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni: bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya, adalah: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Terkait dengan penelitian tesis ini, maka penulis memakai beberapa sumber bahan hukum, seperti:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana dipandang dari aspek pertimbangan hukum putusan perkara pidana, yakni: Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 436 K/Sip/1974 tanggal 30 Maret 1978 menyangkut pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).
- b. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum (*text book*), karya tulis para ahli hukum yang dimuat di media massa maupun media elektronik yang menyangkut

dan berhubungan dengan materi dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana dipandang dari aspek pertimbangan hukum putusan perkara pidana. Selain itu dokumen-dokumen berupa :

- a. Berita Acara Sidang ke tujuh dan ke delapan Nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung.
  - b. Berita Acara Sidang lanjutan keempat Nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Ung.
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 37/Pid/2010/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1074K/PID/2010
  - d. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Ung.
  - e. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 95/Pid.Sus/2010/PN.Ska.
- c. Bahan hukum tersier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut seperti: kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan dampak

yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana dipandang dari aspek pertimbangan hukum putusan perkara pidana.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian tesis ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi dokumenter, yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum yang menyangkut pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) berupa:

- a. Berita Acara Sidang ke tujuh dan ke delapan Nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung.
- b. Berita Acara Sidang lanjutan keempat Nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Ung.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 37/Pid/2010/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1074K/PID/2010
- d. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Ung.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 95/Pid.Sus/2010/PN.Ska.

Pengumpulan bahan hukum juga dilakukan melalui media cetak, media elektronik serta memakai metode sistimatis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum yang menyangkut dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana dipandang dari aspek pertimbangan hukum putusan perkara pidana.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian dilakukan analisa dengan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”<sup>63</sup> Selanjutnya data-data tersebut, dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

### G. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penulisan mengenai penelitian ini akan disusun dalam empat bab. Bab I, Pendahuluan, dilanjutkan dengan Bab II, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari: sub bab A tentang: Tinjauan

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1981, hlm: 250.

Umum Mengenai Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*), sub bab B tentang: Tinjauan Umum Mengenai Proses Persidangan Dengan Acara Pemeriksaan Biasa Menurut KUHAP, sub bab C tentang: Tinjauan Umum mengenai Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana, sub bab D tentang: Tinjauan Umum mengenai Putusan Dalam Perkara Pidana. Kemudian Bab III, mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: sub bab A tentang: Kebijakan Aplikasi Pemeriksaan setempat Dalam Hukum Acara Pidana Pada Saat ini, sub bab B tentang: Fungsi Pemeriksaan setempat Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, Sub bab C tentang: Dampak Yuridis Pemeriksaan setempat Dalam Hukum Acara Pidana. Kemudian Sub bab D tentang : Formulasi Pemeriksaan Setempat Dalam Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana. Selanjutnya Bab IV, sebagai Bab Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum mengenai Pemeriksaan Setempat (*gerech telijke plaatsopneming*).**

Pemeriksaan setempat (*gerech telijke plaatsopneming*) merupakan tindakan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Hal ini dikarenakan, pemeriksaan setempat digunakan untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara.

Pada saat ini, pengaturan mengenai pemeriksaan setempat tidak dapat ditemukan dalam ranah hukum acara pidana. Akan tetapi, pengaturan pemeriksaan setempat tersebut hanya dapat ditemukan dalam ranah hukum acara perdata. Pemeriksaan setempat hanya diatur secara yuridis normatif dalam HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement* ), RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*).

Berdasarkan pemaparan diatas untuk mengetahui lebih rinci mengenai pemeriksaan setempat, maka pemeriksaan setempat dapat ditinjau dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut, antara lain : dasar hukum pemeriksaan setempat, pengertian pemeriksaan setempat, tujuan pemeriksaan setempat, pelaksanaan pemeriksaan setempat,

pendelegasian pemeriksaan setempat dan biaya pemeriksaan setempat.

1. Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) .

Dasar hukum pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara perdata terdapat pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg serta Pasal 211 Rv - Pasal 214 Rv.<sup>64</sup>

a. Dasar hukum pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) pada HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*).

Berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) HIR menyebutkan bahwa “*Jika dipandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang Komisaris dari Majelis dengan dibantu oleh Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim*”. Selanjutnya pada Pasal 153 Ayat (2) HIR menyebutkan bahwa “*Tentang Pelaksanaan tugas serta hasilnya dicatat oleh Panitera tersebut dalam berita acara atau relaas yang akan ditandatangani olehnya dan para Komisaris tersebut*”.

b. Dasar hukum pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) pada RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).

Pengaturan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) pada Pasal 153 Ayat (1) dan (2) HIR tersebut pada dasarnya sama dengan pengaturan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) pada Pasal 180 Ayat (1) dan (2) RBg. Perbedaan antara pengaturan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam HIR dan RBg

---

<sup>64</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...Op Cit*, hlm : 779-781



hanya terdapat penambahan ketentuan pada Pasal 180 Ayat (3) RBg yang mengatur pendelegasian pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) kepada Pengadilan Negeri di tempat objek perkara terletak.

- c. Dasar hukum pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) pada Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*).

Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) pada Rv diatur dalam bab II, bagian 7 dengan titel mengenai pemeriksaan di tempat dan penyaksiannya. Titel tersebut terdiri dari 4 buah Pasal, antara lain .

Pasal 211 Ayat (1) Rv menyebutkan bahwa “*jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli*”. Selanjutnya pada Pasal 211 Ayat (2) Rv menyebutkan bahwa “*dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan*”. Kemudian pada Pasal 211 Ayat (3) Rv menyebutkan bahwa “*putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di kepaniteraan, dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya*”.

Pasal 212 Rv menyebutkan bahwa “*panitera membuat berita acara tentang semua hal yang terjadi di tempat dilakukan pemeriksaan*”. Kemudian Pasal 213 Rv menyebutkan bahwa “*jika pemeriksaan setempat atau penyaksian harus dilakukan dalam wilayah hukum suatu pengadilan, tetapi di luar tempat kedudukannya, maka hal itu dapat diserahkan kepada Residentierechter*”. Selanjutnya

Pasal 214 Ayat (1) Rv menyebutkan bahwa “*mengatur Ongkos jalan ditanggung oleh pihak yang menghendaki diadakannya Pengamatan atau penyaksian setempat, dibayar lebih dan diserahkan kepada panitera*”. Pasal 214 Ayat (2) Rv menyebutkan bahwa “*jika hakim yang memerintahkan pengamatan dan penyaksian setempat, maka ia menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dulu biayanya*”.

Selain itu, dasar hukum pemeriksaan setempat juga terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 436 K/Sip/1974 tanggal 30 Maret 1978. Yurisprudensi tersebut menyebutkan sebagai berikut :

*“Karena judex factie belum pernah mengadakan pemeriksaan mengenai batas-batas tanah tersengketa, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai batas-batas tanah tersebut “.*

## 2. Pengertian Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).

Berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg serta Pasal 211 Rv - Pasal 214 Rv tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai pengertian pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*). Pengertian pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek barang terperkara terletak, guna melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek barang terperkara .

Objek barang perkara dalam pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*), antara lain :<sup>65</sup>

- a. Benda tidak bergerak, seperti tanah atau kapal.
- b. Benda bergerak, dengan syarat apabila benda tersebut sulit atau tidak mungkin untuk diajukan di sidang pengadilan.

3. Tujuan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).

Tujuan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*), antara lain :<sup>66</sup>

- a. Mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas objek barang perkara.
- b. Mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas objek barang perkara. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila objek barang perkara tersebut merupakan barang yang diukur jumlah dan kualitasnya.

Tujuan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) tersebut juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat. Surat edaran tersebut mengatur mengenai pemeriksaan setempat dilaksanakan dalam praktik pengadilan, karena sering terjadi objek barang perkara yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*) disebabkan objek tersebut tidak jelas dan tidak pasti.<sup>67</sup>

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non executable* oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila :

- a. Putusan yang bersifat *deklaratoir* dan *konstitutif*.
- b. Barang yang akan di eksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi.
- c. Barang yang akan di eksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan.
- d. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan.
- e. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan *non executable*, sebelum seluruh proses / acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm : 785

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm : 781

<sup>67</sup> *Loc Cit.*

Penetapan *non executable* harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.<sup>68</sup>

#### 4. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).

Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dilakukan oleh salah satu hakim atau majelis hakim dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berperkara dengan mendatangi tempat objek barang terperkara.

Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) merupakan sidang resmi pengadilan dimana tempat persidangnya bukan berada di ruang sidang pengadilan tetapi berada di tempat objek barang terperkara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara formil pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) harus dihadiri para pihak yang berperkara.<sup>69</sup>

Oleh karena pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) harus dihadiri para pihak yang berperkara, maka pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) harus diberitahu secara resmi kepada para pihak yang berperkara. Namun apabila salah satu pihak tidak hadir pada pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak tersebut. Hal ini dikarenakan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) tidak dapat digantungkan kepada ketidakhadiran pihak tanpa alasan yang sah.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, **Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum**, Penerbit : Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hlm : 104

<sup>69</sup> Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata ... Op Cit**, hlm : 785

<sup>70</sup> *Loc Cit.*

5. Pendelegasian Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).

Pasal 180 Ayat (3) RBg dan Pasal 213 Rv mengatur mengenai pendelegasian pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) kepada Pengadilan Negeri yang lain. Apabila objek barang perkara terletak di wilayah hukum yang berbeda dengan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut, maka pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) harus dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat objek barang perkara tersebut. Pelimpahan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) kepada Pengadilan Negeri lain dilaksanakan sesuai dengan prinsip yurisdiksi relatif yang dimiliki setiap Pengadilan Negeri.

6. Biaya Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*)

Biaya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) diatur dalam Pasal 214 Rv, sesuai dengan patokan sebagai berikut:<sup>71</sup>

a. Biaya dibebankan kepada pihak yang meminta.

Patokan pertama ialah siapa yang meminta dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*), maka menurut hukum pihak yang meminta tersebut dibebankan kewajiban untuk membayar panjar biaya pemeriksaan. Selain itu, biaya panjar tersebut harus dibayar terlebih dahulu sebelum pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dilakukan.

b. Biaya ditentukan oleh Hakim.

Apabila pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dilakukan atas perintah Hakim, maka pembayaran panjar biaya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke*

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm : 786-787

*plaatsopneming*) ditentukan oleh Hakim sendiri. Namun, dalam hal ini perlu diingat ketentuan Pasal 160 Ayat (2) HIR mengatur jika pihak yang dibebani tidak mau membayar biaya panjar pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) tidak dilakukan.

- c. Komponen biaya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*)

Komponen pokok menurut Pasal 214 Rv adalah ongkos jalan. Ongkos jalan merupakan biaya perjalanan pelaksanaan yang terdiri dari paling sedikit Hakim dan Panitera. Besar ongkos jalan tergantung pada jarak kantor Pengadilan Negeri dengan tempat objek barang terperkara. Dasar perhitungannya berdasarkan ongkos transportasi yang dipergunakan ke tempat tersebut. Selain itu, apabila dalam keadaan tertentu diperlukan pengamanan aparat kepolisian, maka perhitungan panjar pemeriksaan ditambah biaya pengamanan tersebut.

## **B. Tinjauan Umum mengenai Proses Persidangan Dengan Acara Pemeriksaan Biasa**

Hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah keseluruhan aturan hukum mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang terkandung dalam hukum pidana tersebut. Pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana diatur dalam Bab XVI KUHAP.

Berdasarkan Bab XVI KUHAP, acara pemeriksaan perkara pidana di persidangan terdiri atas 3 (tiga) jenis, antara lain : acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat.

Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingan, acara pemeriksaan biasa merupakan acara pemeriksaan yang paling utama dan paling luas pengaturannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam

acara pemeriksaan biasa dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana yang membutuhkan ketelitian dalam proses pembuktian di persidangan.<sup>72</sup>

Proses persidangan dengan acara pemeriksaan biasa dilakukan dengan pemeriksaan identitas terdakwa terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan, hak mengajukan eksepsi, ruang lingkup pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan barang bukti, penuntutan dan pembelaan, musyawarah hakim serta pengucapan putusan akhir.

#### 1. Pemeriksaan Identitas Terdakwa.

Proses pertama dalam persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa adalah pembukaan sidang oleh Hakim Ketua. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa. Pemeriksaan identitas terdakwa dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP.

Pasal 155 Ayat (1) KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan identitas Terdakwa oleh hakim ketua. Pemeriksaan tersebut, dilakukan dengan menanyakan daftar identitas Terdakwa sebagai berikut :

- a. Nama lengkap.
- b. Tempat lahir.
- c. Umur atau tanggal lahir.
- d. Jenis kelamin.
- e. Kebangsaan.
- f. Tempat tinggal.
- g. Agama.
- h. Pekerjaan.

---

<sup>72</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP ..Op Cit*, hal : 109

Identitas terdakwa tersebut, kemudian dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan, merupakan terdakwa yang di dakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana. Selain itu, pemeriksaan identitas dilakukan untuk memastikan kebenaran penulisan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara.

## 2. Pembacaan Surat Dakwaan.

Setelah pemeriksaan identitas terdakwa, kemudian hakim ketua memperingatkan kepada terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat di persidangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) KUHP, hakim ketua memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Kemudian hakim ketua menanyakan kepada terdakwa mengenai surat dakwaan tersebut. Apabila terdakwa tidak mengerti mengenai isi surat dakwaan tersebut, maka atas permintaan hakim ketua, penuntut umum wajib memberikan penjelasan yang diperlukan kepada terdakwa.



### 3. Hak Mengajukan Eksepsi.

Pengajuan keberatan (eksepsi) berada setelah tahap pembacaan surat dakwaan. Pengertian eksepsi<sup>73</sup> adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai materi pokok surat dakwaan, akan tetapi pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Eksepsi tersebut diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa.

Pengajuan eksepsi tersebut mempunyai 2 akibat dalam proses pemeriksaan perkara, antara lain :

- a. Apabila dalam putusan sela hakim memutuskan eksepsi ditolak, maka proses pemeriksaan perkara dihentikan.
- b. Apabila dalam putusan sela hakim memutuskan eksepsi diterima atau “eksepsi akan diputus bersamaan dengan putusan akhir”<sup>74</sup>, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan pembuktian.

### 4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Alat Bukti.

Apabila terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau hal-hal yang menyangkut proses eksepsi telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah pembuktian. Tahap pembuktian dilakukan dengan memeriksa alat-alat bukti.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm: 123

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm : 138

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.<sup>75</sup>

Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.<sup>76</sup>

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

---

<sup>75</sup> Hari Sasangka, **Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Penerbit : Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11

<sup>76</sup> Darwan Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Penerbit : Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 135

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

5. Pemeriksaan Terhadap Barang Bukti

Pemeriksaan persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap barang bukti. Pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 181 KUHAP. Pasal 181 Ayat (1) KUHAP mengatur bahwa hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan dan menanyakan apakah terdakwa mengenal barang bukti tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 KUHAP.

Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) KUHAP mengatur hal-hal, antara lain:

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.

- b. Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum, atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Kemudian Pasal 181 Ayat (2) mengatur apabila perlu, barang bukti itu diperlihatkan oleh hakim ketua kepada saksi. Pasal 181 Ayat (3) KUHAP juga menambahkan apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pengajuan barang bukti di muka persidangan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<sup>77</sup>

- a. Apabila barang bukti itu berupa barang yang karena sifat maupun jumlahnya sulit diajukan ke persidangan, maka cukup diajukan contohnya saja.
- b. Dalam hal diperlukan, ketua majelis dapat memerintahkan seorang hakim anggota disertai oleh panitera pengganti untuk memeriksa barang bukti dimaksud dan panitera pengganti wajib membuat berita acara setelah mencocokkannya dengan berita acara penyitaan penyidik.
- c. Barang bukti yang sifatnya cepat rusak, sebelum diajukan ke muka persidangan, dan telah dilelang oleh penuntut umum maka berita acara pelelangan barang bukti serta uang hasil pelelangan wajib dilampirkan dalam berkas perkara dan uang hasil pelelangan harus diajukan sebagai bukti di muka persidangan.
- d. Setiap barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan harus diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, sehingga terhadap barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim.
- e. Barang bukti yang telah di sita dan diajukan ke muka persidangan oleh majelis/hakim dalam putusannya memutuskan barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada

---

<sup>77</sup>Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, **Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus**, Penerbit : Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hlm : 40-41

yang paling berhak, di rampas untuk negara, di rampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada darimana barang itu di sita.

## 6. Penuntutan dan Pembelaan

Proses penuntutan dilakukan apabila pemeriksaan di persidangan telah dinyatakan selesai oleh hakim ketua.

Pemeriksaan dapat dinyatakan selesai, apabila :<sup>78</sup>

- a. Semua alat bukti telah selesai diperiksa  
Alat bukti yang telah selesai diperiksa adalah alat bukti yang diajukan penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum terdakwa telah selesai diperiksa. Selain itu, pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa juga telah lengkap.
- b. Semua barang bukti telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi. Selain itu, menanyakan pendapat kepada terdakwa serta para saksi mengenai barang bukti tersebut .
- c. Semua surat yang ada maupun berita acara penyidikan kepolisian yang dianggap penting sudah dibacakan dalam persidangan. Selain itu, menanyakan pendapat kepada terdakwa atau penuntut umum mengenai isi surat dan berita acara penyidikan kepolisian tersebut.

Setelah hakim ketua menyatakan di persidangan bahwa pemeriksaan dalam perkara pidana telah selesai, maka kemudian giliran penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*). Apabila penuntut umum telah mengajukan penuntutannya, maka giliran terdakwa atau penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan (*pleidoi*).

Setelah pengajuan *pleidoi*, kemudian hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum mengajukan replik. Replik

---

<sup>78</sup>Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP ..... Op Cit** , hlm: 260

merupakan tanggapan terhadap pembelaan (*pleidoi*). Selanjutnya hakim ketua juga memberikan hak yang sama kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan duplik. Duplik merupakan tanggapan terhadap replik.

## 7. Pengucapan Putusan Akhir

Setelah pengajuan duplik, maka tahap selanjutnya adalah penjatuhan putusan akhir oleh majelis hakim. Putusan akhir tersebut, akan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim harus melalui proses musyawarah hakim yang bersifat *intern* dan rahasia.

Setelah proses musyawarah hakim selesai, kemudian giliran hakim mengucapkan putusan akhir dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Selain itu, pengucapan putusan akhir dilakukan dengan kehadiran terdakwa. Apabila selesai pengucapan putusan akhir oleh majelis hakim, maka berdasarkan Pasal 196 Ayat (3) KUHAP hakim ketua wajib memberitahukan segala hak yang dimiliki oleh terdakwa.

Menurut Pasal 196 Ayat (3) KUHAP, hak-hak yang dimiliki oleh Terdakwa setelah pengucapan putusan oleh majelis hakim, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

- c. Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan.
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

### C. Tinjauan Umum mengenai Sistem Pembuktian Pidana

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang di dakwa kepada terdakwa

#### 1. Pengertian Pembuktian

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. Akan tetapi, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian.

Menurut Subekti, "Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa".<sup>79</sup>

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas

---

<sup>79</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, Penerbit : Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm : 1



sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>80</sup>

Yang dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian mengenai benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung-jawabkannya.<sup>81</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>82</sup>

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistim yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>83</sup>

Ditinjau dari segi hukum acara pidana, berdasarkan KUHAP mengenai beberapa pedoman dan penggarisan dalam pembuktian, yaitu sebagai berikut :

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya

---

<sup>80</sup>Martiman Prodjohamidjojo, **Komentar Atas KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Penerbit : Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, Hlm :11

<sup>81</sup>Darwan Prinst, **Op Cit**, Hlm : 133

<sup>82</sup>M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...Op Cit**, Hlm : 273

<sup>83</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, Penerbit : Mandar Maju, Bandung. 2003, hlm : 10

membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa.

- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
- c. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.<sup>84</sup>

## 2. Sistim Pembuktian

Ada beberapa sistim atau teori pembuktian, yaitu antara lain:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistim ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.

---

<sup>84</sup>Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...Op Cit.** Hlm : 274

Sistim pembuktian *conviction in time* banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistim peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.<sup>85</sup>

b. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistim pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa. Akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis serta diterima oleh akal pikiran yang sehat.

Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena tidak diisyaratkan dalam sistim ini. Keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.

Keyakinan hakim dalam sistim pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan. *Reasoning* itu sendiri harus pula “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa

---

<sup>85</sup> Hari Sasangka, *Op. Cit*, Hlm : 15

batas. Sistim pembuktian ini sering disebut dengan sistim pembuktian bebas.

c. Sistim Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*)

Sistim ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistim pembuktian *conviction in time*. Hal tersebut dikarenakan sistim *conviction in time* menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa, didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa.

Teori *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Meskipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan kepada Terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa harus dibebaskan.

Sehingga, apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistim pembuktian ini, adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif.

Titik berat sistim pembuktian positif adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistim pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

d. Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif  
(*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistim pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistim yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistim pembuktian *positif wettelijk* dan sistim pembuktian *conviction intime*. Sistim pembuktian *negatief wettelijk* artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam sistim *negatif wettelijk*, ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

1) *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.

2) *Negatief*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim,

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistim *negatif wettelijk*, merupakan sistim yang membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan bukti-bukti serta hakim yakin atas kesalahan

terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat).

Meskipun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang. Namun apabila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang dipakai dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia.<sup>86</sup>

#### **D. Tinjauan Umum mengenai Putusan Dalam Perkara Pidana**

Berdasarkan etimologi atau asal kata yang diterjemahkan dari kata *vonis* (latin), pengertian putusan adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.”<sup>87</sup>

Pendapat senada mengatakan, “Istilah kata putusan dalam praktek pengadilan lebih sering disebutkan dengan istilah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir dengan sebutan “*eind vonnis*.”<sup>88</sup>

Untuk mendapatkan kesatuan pemahaman yang dapat dipakai sebagai landasan dalam proses peradilan pidana, dalam KUHAP secara yuridis normatif ditentukan mengenai pengertian dari putusan pengadilan yang rumusan redaksionalnya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang menyatakan bahwa, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

---

<sup>86</sup>Adnan Paslyadja, **Hukum Pembuktian**, Penerbit : Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hlm : 16-22.

<sup>87</sup>Leden Marpaung, **Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya**, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm: 58.

<sup>88</sup>Ansorie Sabuan. et.al, **Hukum Acara Pidana**, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Penerbit: Angkasa, Bandung, 1990, hlm: 198.

pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan serta pembuktian di persidangan. Putusan tersebut dapat berbentuk putusan bebas, putusan lepas ataupun putusan pemidanaan. Berikut ini, pemaparan mengenai bentuk putusan pengadilan dan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan.

#### 1. Bentuk Putusan Pengadilan

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara pidana, bisa berbentuk sebagai berikut :

##### a. Putusan Bebas

Menurut Wiryono Prodjodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan, “Pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni”.<sup>89</sup>

Di sisi lain, Djoko Prakoso mengatakan, bahwa :

Vrijspraak adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan

---

<sup>89</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Penerbit: Sumur, Bandung, 1977, hlm: 93

mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.<sup>90</sup>

Menurut Soekarno, bahwa *Vrijspraak*, adalah, “Salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.<sup>91</sup>

Selanjutnya Harun M. Husein berpendapat:

Sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>92</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli hukum di atas, pada prinsipnya dalam definisi putusan bebas (*vrijspraak*) mengandung unsur-unsur yang sama dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu terdakwa dapat diputus bebas apabila pengadilan berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

---

<sup>90</sup>Djoko Prakoso, ***Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP***, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm: 270.

<sup>91</sup>Soekarno, ***Dalih Verkapte Ontslag van Rechtvervolging***, Majalah Pengayoman Nomor: 6, Tahun III, Juli, 1978, hlm: 15.

<sup>92</sup>Harun M. Husein, ***Kasasi Sebagai Upaya Hukum***, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm : 108.



b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) mengandung kriteria sebagai berikut :

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Akan tetapi, sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Berikut alasan-alasan dijatuhkannya putusan lepas dari segala tuntutan hukum:

- 1) Karena peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.
- 2) Apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan dalam:
  - a) Pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa;
  - b) Pasal 45 KUHP, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan anak di bawah umur;
  - c) Pasal 48 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*);
  - d) Pasal 49 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*);
  - e) Pasal 50 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang atau;

- f) Pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.<sup>93</sup>

c. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHP, Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Putusan yang menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang berisi perintah untuk memidana terdakwa. Selain itu, apabila status terdakwa tidak ditahan, maka putusan tersebut dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Namun, apabila status terdakwa dalam tahanan, maka putusan tersebut memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim dapat menentukan hukuman berdasarkan jenis-jenis pemidanaan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok, terdiri dari:
  - a) Pidana mati.
  - b) Pidana penjara.

---

<sup>93</sup>Djoko Prakoso, ***Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP***, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm: 272-273

- c) Pidana kurungan.
- d) Pidana denda.
- 2) Pidana Tambahan, terdiri dari:
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b) Perampasan barang-barang tertentu.
  - c) Pengumuman putusan hakim.

Mengenai hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri akan tetapi hanya dapat dikenakan disamping pidana pokok.

## 2. Hal yang Harus Dimuat dalam Putusan

Berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, hal-hal yang harus

dimuat dalam putusan pemidanaan harus memuat, sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan.
- d. Tuntutan pidana.
- e. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.
- f. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim.
- g. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- h. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- i. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- j. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- k. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Berdasarkan Pasal 197 Ayat (2), apabila tidak dipenuhinya ketentuan pada huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l, maka berakibat putusan batal demi hukum.

Sedangkan untuk hal yang harus dimuat dalam putusan bukan pembedaan, tidak harus memuat ketentuan pada Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Pada Pasal 199 KUHAP telah menentukan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan bukan pembedaan. Surat putusan bukan pembedaan memuat, antara lain :

- a. Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1), kecuali huruf e, f dan h.
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan, jika ia ditahan.

Pelaksanaan putusan bukan pembedaan terhadap perintah segera membebaskan terdakwa, dilaksanakan oleh penuntut umum. Namun perlu diingat, bahwa putusan bukan pembedaan terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan, batal demi hukum apabila tidak memuat amar yang memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...Op Cit.* Hlm : 374

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdullah, 2008, ***Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan***, Penerbit :  
Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo.

Achmad Ali, 1993, ***Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)***, Penerbit : Chandra Pratama, Jakarta.

Ahmad Rifai, ***Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif***, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ansorie Sabuan. et.al, 1990, ***Hukum Acara Pidana***, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Penerbit: Angkasa, Bandung.

A. Siti Soetami, 2001, ***Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi Revisi 2001***, Penerbit: Rafika Editama, Bandung .

Bachsan Mustafa, 2003, ***Sistim Hukum Indonesia Terpadu***, Cetakan 1, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 2006, ***Metodelogi Penelitian Hukum***, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta.

Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007, ***Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum***, Penerbit : Mahkamah Agung RI, Jakarta.

-----, 2007, ***Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus***, Penerbit : Mahkamah Agung RI, Jakarta.

- Barda Nawawi Arief, 2008, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, ***Hukum Acara Pidana Dalam Praktik***, Penerbit : Djambatan, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1985, ***Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP***, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, ***Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana***, Penerbit : Mandar Maju, Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, ***Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana***, Penerbit : Mandar Maju, Bandung.
- Harun M. Husein, ***Kasasi Sebagai Upaya Hukum***, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Hilaire Mc. Coubrey and Nigel D. White, 1993, ***Texbook On Jurisprudence***, Second Edition, Penerbit : Blacstone Press Ltd University of Nottingham, London.
- H.S. Prajudi, A, 1973, ***Dasar-Dasar Office Manajemen***, Penerbit: Ghalia, Jakarta
- Jazim Hamidi, 2005, ***Hermeunetika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks***, Penerbit : UII Press, Yogyakarta.
- Johny Ibrahim, 2005, ***Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, Penerbit : Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1995, ***Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya***, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, ***Peraturan Akademik dan Pedoman Penyusunan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro***, Semarang.

- Made Sadhi Astuti, 1997, ***Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana***, Penerbit : IKIP Malang, Malang.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, ***Komentar Atas KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana***, Penerbit : Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, ***Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek***, Penerbit :Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeslim Abdurrahman.et Al, 1996, ***Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 15***, Penerbit: P.T. Citra Adi Pustaka, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1981, ***Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis***, Penerbit : Alumni, Bandung.
- Musanef, 1989, ***Sistim Pemerintahan di Indonesia***, Penerbit: CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, ***Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)***, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Pamudji, 1981, ***Teori Sistim dan Pengertiannya Dalam Manajemen***, Penerbit: Ikhtiar Baru, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, ***Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang : Metodologi Penelitian Hukum***, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rd. Achmad S. Soema Di Pradja, 1981, ***Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia***, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1999, ***Rangkuman Intisari Ilmu Hukum***, Cetakan Kedua, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Penerbit: Ghalia Indonesia.

- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, ***Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia***, Penerbit: Mandar Maju, Bandung.
- Soesilo Yuwono, 1982, ***Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P Sistem Dan Prosedur***, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1981, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Cetakan Pertama, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Sumanti, 1976, ***Sistim-Sistim Pemerintahan Negara-Negara***, Penerbit: Tarsito, Bandung
- Subekti, 2001, ***Hukum Pembuktian***, Penerbit : Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 2005, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Cetakan XI, Penerbit: Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, Penerbit : Liberty, Yogtakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, ***Bab-bab Tentang Penemuan Hukum***, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sunaryo Wignydipuro, 1979, ***Ilmu Hukum***, Cetakan ke II, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Tatang M. Amirin, 2001, ***Pokok-Pokok Teori Sistim***, Cetakan ke-7, Penerbit: PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Utrecht, 1957, ***Pengantar Dalam Hukum Indonesia***, Cetakan ke-4, Penerbit: Ikhtiar, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1977, ***Hukum Acara Pidana di Indonesia***, Cetakan Ketujuh, Penerbit: Sumur, Bandung.



Yahya Harahap, 2010, ***Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan***

Cetakan Kesepuluh, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2008, ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali***, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2011, ***Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia***, Cetakan Kedua, Penerbit :Widya Padjajaran, Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Herzeine Inlandsch Reglement ( HIR )*

Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 pada tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP

RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)

Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992, tgl 21 oktober 1992 tentang azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Tindakan

Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan  
Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi

Undang-undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan  
kegiatan subversi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang  
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan  
Pemukiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan  
Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-  
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi  
Elektronik

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yurisprudensi Mahkamah Agung : tgl. 30 Maret 1978 No. 436 K/Sip/1974  
tentang Pemeriksaan Setempat

Yurisprudensi Putusan Reg.No.275K/Pid/1983 tentang Putusan Bebas

### **C. DOKUMEN**

Berita Acara Sidang ketujuh Nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung

Berita Acara Sidang kedelapan Nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung

Berita Acara Sidang lanjutan keempat Nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Ung

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1074K/PID/2010

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :  
95/Pid.Sus/2010/PN.Surakarta

Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 198/Pid.B/2009/PN.Ung

Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 235/Pid.B/2010/PN.Ung

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor :  
37/Pid/2010/PT.Smg

### **D. KAMUS**

Tim Redaksi Tata Nusa, 1999, ***Kamus Istilah Menurut Peraturan  
Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998***, Penerbit:  
PT. Tatanusa, Jakarta

### **E. MAJALAH DAN SURAT KABAR**

Bagir Manan, 2006, ***Hakim dan Pemidanaan***, Majalah Hukum Varia  
Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus 2006, Ikahi, Jakarta.

Lintong O. Siahaan, 2006, ***Peran Hakim Agung dalam Penemuan  
Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan***

***Transformasi***, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 252 November 2006, Ikahi, Jakarta

Prija Djatmika, ***Problem Menegakkan Keadilan Substantif***, Harian Jawa Pos, Rabu 10 Desember 2008

Soekarno, ***Dalih Verkapte Ontslag van Rechtvervolging***, Majalah Pengayoman Nomor: 6, Tahun III, Juli, 1978

#### **F. MEDIA ELEKTRONIK**

<http://translate.google.co.id/>

<http://www.google.com/> dampak yuridis pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana dipandang dari aspek pertimbangan hukum putusan pidana

<http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>